



PERJANJIAN KINERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2023



2023

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
DENGAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. MUHAMAD TAUFIK
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

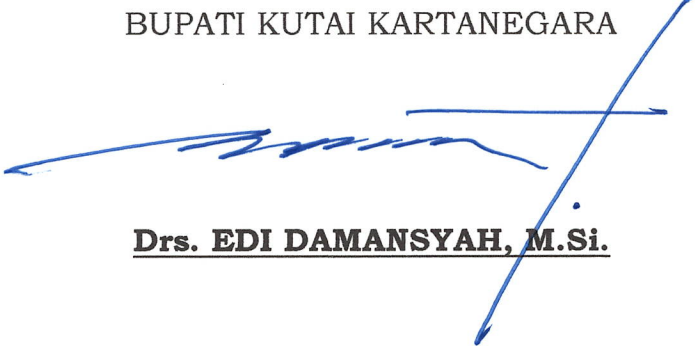
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

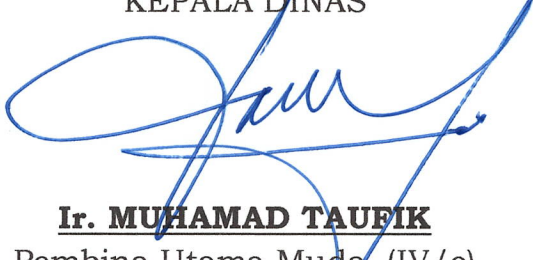
Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196706251992031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	277,032
		Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3,064,670
		Produksi Karet	Ton	9,616
		Produksi Lada	Ton	2,001
		Produksi Kelapa Dalam	Ton	2,706
		Produksi Kopi	Ton	14
		Produksi Kakao	Ton	39
		Produksi Aren	Ton	446
		Produksi Kelor	Ton	8
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	14,510
		Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	17,540
		Produktivitas Karet	Kg/Ha	978
		Produktivitas Lada	Kg/Ha	700
		Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	472
		Produktivitas Kopi	Kg/Ha	420
		Produktivitas Kakao	Kg/Ha	718
		Produktivitas Aren	Kg/Ha	2,926
		Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1,262
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Nilai	100
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1

	(BPK)/ Inspektorat Daerah			
5	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
6	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
8	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
9	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
10	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai	Jumlah Inovasi	Jumlah	1

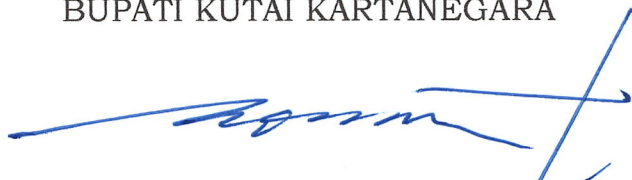
	dengan fungsi perangkat daerah			
11	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
12	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
13	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
14	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
15	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
16	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100
18	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	542,820,000

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

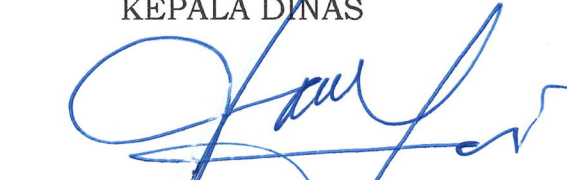
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.271.000.000,00	APBD
2	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	550.000.000,00	APBD
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.368.750.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	450.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.128.820.598,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		45.018.570.598,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196706251992031007

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN
DENGAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. TAUFIK RAHMANI, SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

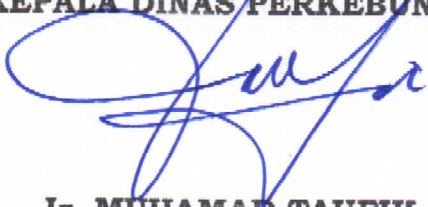
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

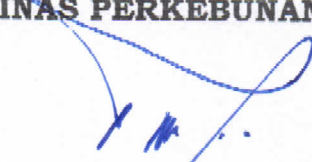
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN


Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS
DINAS PERKEBUNAN**


M. TAUFIK RAHMANI, SP., MP
Pembina / IV/a
NIP. 19701103 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Prangkat Daerah	Nilai	78,00
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)

7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100

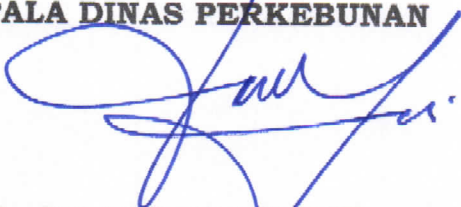
16	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	542.820.000
17	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9
18	Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15
19	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1
20	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1
21	Tersusunnya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang akuntabel	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3
22	Terlaksananya Kegiatan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6
23	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
24	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	107

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

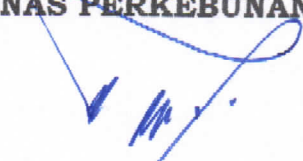
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	469.000.000	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.537.136.598	APBD
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.660.000	APBD
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	25.000.000	APBD
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	920.000.000	APBD
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.196.520.000	APBD
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.948.250.000	APBD
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.254.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		27.128.820.598	

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN


Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
SEKRETARIS
DINAS PERKEBUNAN


M. TAUFIK RAHMANI, SP.,MP
Pembina / IV/a
NIP. 19701103 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PRODUKSI
DENGAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUBAGIO, SP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PRODUKSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

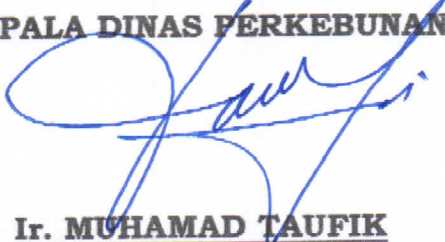
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN


Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRODUKSI


SUBAGIO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19680601 200801 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	277,032
		Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3,064,670
		Produksi Karet	Ton	9,616
		Produksi Lada	Ton	2,001
		Produksi Kelapa Dalam	Ton	2,706
		Produksi Kopi	Ton	14
		Produksi Kakao	Ton	39
		Produksi Aren	Ton	446
		Produksi Kelor	Ton	8
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas KelapaSawit Rakyat	Kg/Ha	14,510
		Produktivitas KelapaSawit PBS	Kg/Ha	17,540
		Produktivitas Karet	Kg/Ha	978
		Produktivitas Lada	Kg/Ha	700
		Produktivitas KelapaDalam	Kg/Ha	472
		Produktivitas Kopi	Kg/Ha	420
		Produktivitas Kakao	Kg/Ha	718
		Produktivitas Aren	Kg/Ha	2,926
		Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1,262
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1

4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Produksi	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Produksi	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai	Jumlah Inovasi	1	Jumlah
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100

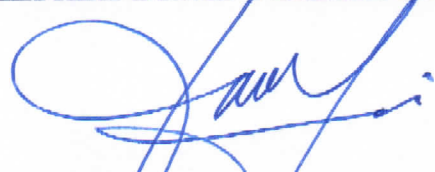
12	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100
17	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	542.820.000
18	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	Paket	269
19	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	21

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.928.000.000	APBD
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	5.368.750.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.296.750.000	

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRODUKSI



SUBAGIO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19680601 200801 1 011

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERBENIHAN
DENGAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SUMARNO, SP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERBENIHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

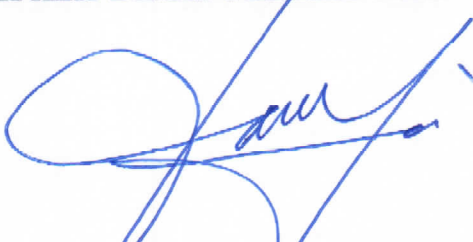
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

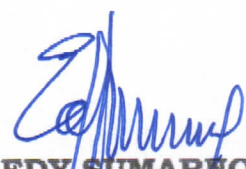
Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PERBENIHAN**



EDY SUMARNO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19651215 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	277,032
		Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3,064,670
		Produksi Karet	Ton	9,616
		Produksi Lada	Ton	2,001
		Produksi Kelapa Dalam	Ton	2,706
		Produksi Kopi	Ton	14
		Produksi Kakao	Ton	39
		Produksi Aren	Ton	446
		Produksi Kelor	Ton	8
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas KelapaSawit Rakyat	Kg/Ha	14,510
		Produktivitas KelapaSawit PBS	Kg/Ha	17,540
		Produktivitas Karet	Kg/Ha	978
		Produktivitas Lada	Kg/Ha	700
		Produktivitas KelapaDalam	Kg/Ha	472
		Produktivitas Kopi	Kg/Ha	420
		Produktivitas Kakao	Kg/Ha	718
		Produktivitas Aren	Kg/Ha	2,926
		Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1,262
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Pengembangann dan Perbenihan	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Pengembangann dan Perbenihan	Persen	100

4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100

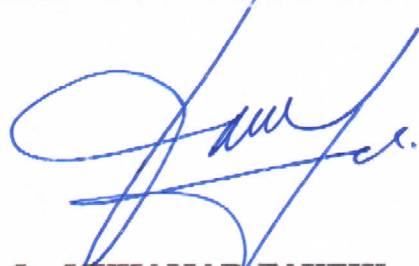
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100
16	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	542.820.000
17	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	Paket	373
18	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Komoditi	1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.518.000.000	APBD
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		8.968.000.000	

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PERBENIHAN



EDY SUMARNO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19651215 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG USAHA DAN PENYULUHAN
DENGAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMSIAR, S.Hut.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG USAHA DAN PENYULUHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

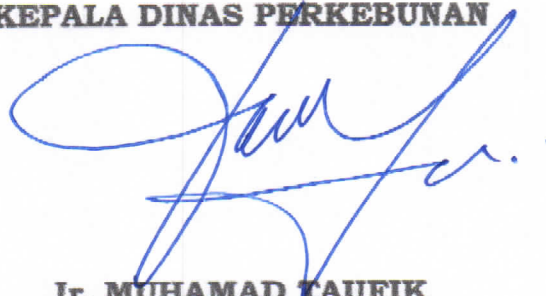
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG USAHA DAN
PENYULUHAN**



SAMSIAR, S.Hut., M.Si
Pembina / IV/a
NIP. 19741231 199703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Nilai	100
1	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Usaha dan Penyuluhan	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Usaha dan Penyuluhan	Persen	100
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai	Jumlah Inovasi	1	Jumlah

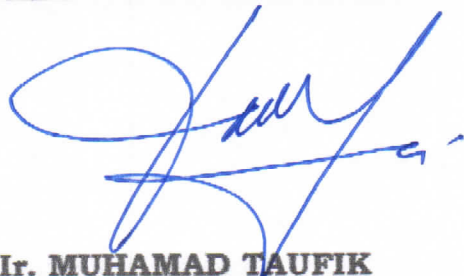
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
9	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
10	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
11	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
12	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
13	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
14	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100
15	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	212
16	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	49

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	APBD
2	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	550.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		800.000.000	

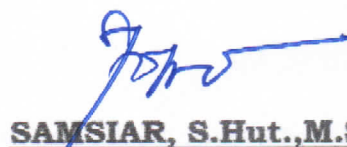
Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG USAHA DAN
PENYULUHAN**



SAMSIAR, S.Hut., M.Si
Pembina / IV/a
NIP. 19741231 199703 1 008

PERJANJIAN KINERJA

Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DENGAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SUMARNO, SP**

Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERKEBUNAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

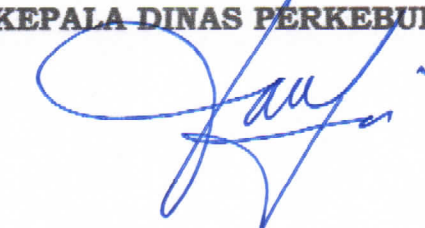
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

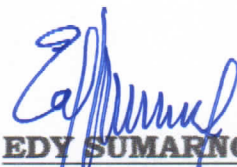
Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN



Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**PLT. KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN**



EDY SUMARNO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19651215 200801 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	277,032
		Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3,064,670
		Produksi Karet	Ton	9,616
		Produksi Lada	Ton	2,001
		Produksi Kelapa Dalam	Ton	2,706
		Produksi Kopi	Ton	14
		Produksi Kakao	Ton	39
		Produksi Aren	Ton	446
		Produksi Kelor	Ton	8
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Perlindungan	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Bidang Perlindungan	Persen	100
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
9	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
10	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
11	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1

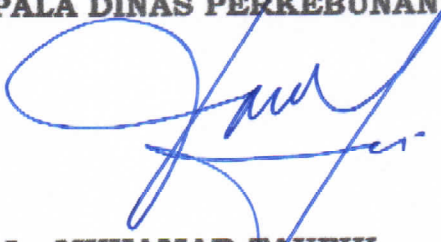
12	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
13	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
14	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100
15	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Hektar	220

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

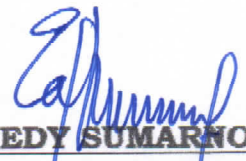
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	450.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		450.000.000	

Kutai Kartanegara, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN


Ir. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670625 199203 1 007

Pihak Pertama,
**PLT. KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN**


EDY SUMARNO, SP
Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19651215 200801 1 010